

**PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENGAWASAN**
(Studi di BPD Desa Padanglandung, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

(Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik)



Disusun Oleh:
ALFRED UMBU KADU AMAH
Nim: 18031000019

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

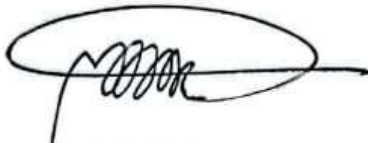
Judul: PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN (Studi di BPD Desa Padanglandung, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : ALFRED UMBU KADU AMAH
NPK : 18031000019
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas : MERDEKA MALANG

Disetujui Pada Tanggal :

Malang.....

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Sukardi, M.Si

Dosen Pembimbing II


Chandra Dinata, S.Sos., MPA

Menyetujui


Dr. Yuniawati F., S.Sos., M. AB

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul: PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN (Studi di BPD Desa Padanglandung, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : ALFRED UMBU KADU AMAH
NPK : 18031000019
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas : MERDEKA MALANG

Disetujui Pada Tanggal :
Malang.....

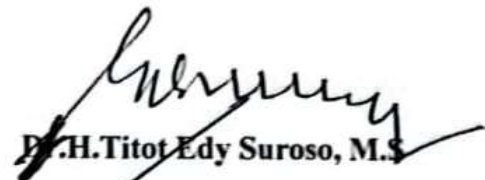
Susunan Tim Penguji

Ketua



Dr. Sri Hartini Jatmikowati, M.S

Sekretaris



Dr. H. Titot Edy Suroso, M.S

Anggota



Akbar Pandu Dwinugraha, S.Ap, M.Ap

Menyetujui



Dr. Yuntawati F., S.Sos., M. AB

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALFRED UMBU KADU AMAH
NIM : 18031000019
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Universitas : Universitas Merdeka Malang

Mengatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan mengenai skripsi yang telah saya susun sekarang ini:

1. Masih belum diajukan oleh orang lain dalam rangka memperoleh gelar akademik sarjana strata I
2. Tidak memiliki kesamaan dengan karya-karya tulisan ilmiah yang sudah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain.
3. Setiap kutipan yang bersumber dari karya orang lain pada naskah ini, selalu disebutkan sumber referensinya dan tertulis secara resmi dalam daftar pustaka.

Atas dasar pernyataan tersebut, apabila di dalam naskah ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia mengatakan karya tulis ilmiah akademik skripsi ini digugurkan dan dengan segala konsekuensi yang menyertainya termasuk pembatalan gelar akademik yang diperoleh bahkan bersedia untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 25 ayat 2 dan pasal 70) serta panduan pencegahan plagiasi yang telah ditetapkan lewat Keputusan Dekan FISIP Unmer Malang Nomor Kep.12.A/FISIP/UM/VII/2016 tanggal 7 Juli 2016.

Malang, ..2022

:g menyatakan,


ALFRED UMBU KADU AMAH

MOTO

SETIAP PROSES DALAM HIDUP ADA LEVEL NYA DAN SETIAP LEVEL ADA TANTANGAN NYA JADILAH KUAT DAN TAKLUKAN SETIAP LEVEL TERSULIT.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan
buat orang tua.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam pengawasan studi penelitian Desa Pandan Landung kec.wagir,kab.malang. penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang di tempuh guna menyelesaikan program Pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang.

Penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan support dari berbagai pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada :

1. Dr. Yuntawarti F, S.Sos., M. AB selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang
2. Chandra Dinata, S.Sos., MPA selaku Kaprodi Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang
3. Dr. H. Sukardi, M.Si dan Chandra Dinata, S.Sos., MPA. selaku Dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dari awal penulisan hingga menyelesaikan Skripsi ini dengan hasil yang baik.

4. Ayah Terkasih Bidang Ndula Ratu dan Ibu tercinta Elisabet Atahau, serta keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, membantu dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
5. Kakak Aryanti Tamu Ina, Agreni Rambu Konda yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral dan materil.
6. Adik Aldian Umbu Hada Mbiwa, Asmilia Rambu Maramba Humba yang selalu mendorong Doa untuk sya selama berkuliah.
7. Kaka-Kaka senior Armanto Umbu Tamu, Mefianus Huka Pati, yang selalu memotivasi dan membimbing selama mengerjakan tugas akhir.
8. Teman yang selalu mendukung dan memotivasi, Ridwan Ertanto Praimawoli, Rambu Armita, Umbu jejing, Umbu Bintang, jekson njuka, Erik Umbu, Umbu Irwan, Umbu Ervan dan teman-teman yang tidak saya sebutkan.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 administrasi publik yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh bapak ibu dosen Program studi administrasi publik Universitas Merdeka Malang yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh Staff beserta karyawan Fisip Universitas Merdeka Malang yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama kuliah.

12. Seluruh pihak-pihak yang tidak bisa sebutkan satu persatu dalam laporan ini, semoga keiklasan dalam membantu sehingga menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan dan pengalaman yang ada pada penulis. Penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dan penyempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap bahwa Skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang mempunyai kepedulian dengan masalah pembangunan sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam penelitian lainnya.

Malang Agustus 2022

ALFRED UMBU KADU AMAH

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSIi

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI..... iii

MOTOiv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... viii

ABSTRAKx

ABSTRAC.....xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Manfaat Penelitian..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11

A. Landasan Teori 11

1. Badan permusrawatan desa (BPD) 11

2. Pemerintah desa 19

3. Peran dan Fungsi legalitas badan permusyarawatan desa (BPD)23

4. Konsep Pengawasan30

5. Peran dan fungsi BPD dalam pengawasan38

6. Mekanisme pemilihan BPD40

B. Konsep pembangunan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Fokus penelitian	52
D. Informan.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Sejarah Desa.....	62
B. Kondisi Geografis	64
C. Batas Desa.....	66
D. Pendidikan.....	68
E. Agama	71
F. Keadilan soasial	72
G. Visi dan Misi	76
H. Struktur Pemerintahan Desa.....	78
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana peran dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir kabupaten malang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di diketahui bahwa tugas sebagai BPD sebagaimana terjadi di Desa Pandanlandung yaitu Selain mengetahui kebutuhan masyarakat, melalui musyawarah juga akan terungkap setiap aspirasi–aspirasi dari masyarakat, laporan pertanggungjawaban ini di maksudkan agar seluruh masyarakat mengetahui aspek-aspek kebijakan yang sudah di lakukan oleh pemerintah desa pandanlandung, seperti kebijakan menjaga lingkungan dari sampah, menjaga solidaritas antar masyarakat. dan apa yang di harapkan oleh masyarakat Desa pandanlandung karena setiap kebijakan dan keputusan yang di ambil oleh BPD harus juga selaras dengan kebutuhan masyarakat Desa supaya tidak terciptanya permasalahan.

Pelaksanaan Peran BPD di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang Kehadiran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Penyaluran aspirasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa. Dalam menjalankan peran Badan Permasyarakatan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Padabglandung Kabupaten Malang ditemukan konsekuensi hukum yang diterapkan yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pemberhentian sebagai anggota BPD.

Kata kunci: Peran dan Fungsi BPD Pandan Landung

ABSTRAC

Law Number 23 of 2014 concerning regional government has provided various changes towards improving the welfare of the community through good service, as well as maximum performance in a direct and transparent manner. With regional autonomy, local governments can pay more attention to remote areas in the framework of equitable development. The BPD is a deliberative body whose members come from the village community and are democratically elected. Besides carrying out its function as a connecting place, between the Village Head and the community. With the BPD it is hoped that the aspirations of the community will be conveyed in carrying out village physical development tasks in line with the Village Head's policies in carrying out tasks. In this case the task of the Village Consultative Body is to oversee the implementation of the village's physical development which is managed by the Village Head as the Village government.

Based on the description contained in the background above, the following is formulated regarding some of the main issues in this study, namely: "What are the roles and functions of the Village Consultative Body (BPD) in Development carried out in Pandanlandung Village, Wagir District, Malang Regency.

Based on the results of the interview above, it can be seen that the task of being a BPD is the same as what happened in Pandanglandung Village, namely that apart from knowing the needs of the community, through deliberations it will also reveal every aspiration from the community, this accountability report is intended so that all people know the aspects of the policies that have been implemented. carried out by the Pandanlandung village government, such as the policy of protecting the environment from garbage, maintaining solidarity between communities. and what is expected of the Padanlandung Village community because every policy and decision taken by the BPD must also be aligned with the needs of the Village community so that problems do not create.

Implementation of the Role of the BPD in Pandanglandung Village, Malang Regency The presence of the Village Consultative Body (BPD) has carried out its function in absorbing and channeling community aspirations to support development in accordance with the needs of all village communities. This channeling of aspirations really helps the community in expressing opinions and submitting important proposals for the benefit of village development in accordance with Regional Regulation Number 16 of 2017 concerning the Village Consultative Body. In carrying out the role of the Village Consultative Body in accommodating and channeling community aspirations in Padabglandung Village, Malang Regency, legal consequences were found to be applied, namely administrative sanctions in the form of written warnings and dismissal as members of the BPD.

Keywords: Role and Function of BPD Pandan Landung